

## MANAJEMEN INOVASI *OPEN DATA* DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Anne Friday Safaria\*, Entang Adhy Muhtar\*\*, Ira Irawati\*\*  
Ida Widianingsih\*\*\*

\*Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran. Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135. [annefriday2203@gmail.com](mailto:annefriday2203@gmail.com)

\*\*Lektor Kepala pada Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran

\*\*\*Peneliti Senior pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, FISIP, Universitas Padjadjaran

### *Abstract*

*This article is the result of research on the implementation of open data innovation in public information services in the Government of Bandung Municipality, as the only pilot city of Open Data in Indonesia. This innovation management was analyzed using Lewin's three steps model of change management approach modified by Pugh in the context of information services. This research aims to answer the question why the implementation of Open Data innovation has not been effective in the Bandung Municipality government, and to find new concepts for the development of change and innovation management, especially in the public sector.*

*Keywords: Open Data, Innovation, Public Information, Change Management*

### Abstrak

Artikel ini merupakan hasil riset pelaksanaan inovasi *open data* dalam layanan informasi publik pada Pemerintah Kota Bandung, sebagai satu-satunya kota percontohan *Open Data* di Indonesia. Manajemen inovasi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan Manajemen Perubahan model *three steps* Lewin yang dimodifikasi oleh Pugh dalam konteks pelayanan informasi. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan inovasi *Open Data* belum efektif di pemerintah Kota Bandung, dan untuk menemukan konsep baru bagi pengembangan manajemen perubahan dan inovasi, khususnya di sektor publik.

Kata kunci: Open Data, Inovasi, Informasi Publik, Manajemen Perubahan

### PENDAHULUAN

Manajemen *Open Data* (OD) sebagai inovasi di sektor publik merupakan isu aktual dalam Administrasi Publik. Hal ini berkaitan dengan konsep *Big Data* dan

*One Data. Big Data* dalam konteks riset ini merupakan gambaran besarnya data yang dikuasai oleh badan publik yang mencapai titik kritis dari sisi volume, kecepatan, maupun ragamnya (3V: *Volume, Velocity,*

*Variety*), sehingga membutuhkan teknologi baru dalam pengelolaannya agar berstatus 4V (*plus Value*), yaitu data yang bernilai (Monino & Sedkaoui, 2016: xi-3). Kini istilah *Big Data* juga berarti teknologi aplikasi komputer untuk menyimpan dan mengelola data 3V tersebut..

Kemudian *One Data* adalah penyajian data yang kredibel melalui satu portal (*One Gate*) sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan publik, tetapi belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. *Open Data* (OD) merupakan format data yang disarankan dalam penyajian *One Data* dengan tujuan agar publik bukan hanya dapat mengakses tetapi juga dapat turut serta mengolahnya baik untuk kepentingan diri dan lingkungannya maupun peran sertanya dalam tata kelola pemerintah (OGI, 2015). OD adalah data yang secara publik tersedia dan bebas bagi siapapun untuk menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusi (*to use-reuse-redistribution*). OD dapat bebas diunduh di *website* karena disertai dengan lisensi terbuka yang memungkinkan pihak komersial maupun non komersial menggunakan dan mendistribusi tanpa pembatasan (Stagars, 2016: 1-2).

*Open Data* (OD) diperkenalkan kepada pemerintah daerah, dengan *pilot project* di tiga pemda yaitu Provinsi DKI, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Bandung. OD sebagai bagian dari gerakan

*Open Government Indonesia* (OGI) dikelola oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4, Kini bernama Kantor Staf Presiden/KSP). OGI sendiri adalah sebuah gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Bandung sebagai organisasi dan sebagai sebuah sistem dapat dipastikan akan mengalami perubahan manajemen, karena munculnya hal-hal baru, baik yang terencana/tidak di salah satu atau beberapa unsurnya. Begitu pula halnya dengan program OD yang dicanangkan pada tanggal 5 Desember 2014 yang secara jelas merupakan kebijakan baru yang menuntut berbagai perubahan dan penyesuaian di tubuh organisasi. Tentunya bisa diprediksi dan dimungkinkan munculnya berbagai masalah yang menyertai perubahan tersebut.

Dalam *self assessment* yang dituangkan dalam *Roadmap* OD Kota Bandung 2016-2018 diuraikan analisis kesenjangan yang merupakan analisis keadaan saat ini berdasarkan capaian

yang diinginkan. Berdasarkan hal itu maka ditemukan masalah yang berkaitan dengan implementasi OD yang belum efektif meliputi: kesenjangan pada tata kelola, SDM, teknologi, dan organisasi. Berikut adalah uraiannya:

**Tabel 1 Kesenjangan Pelaksanaan OD di Pemerintah Kota Bandung**

No.	Subyek	Keadaan saat ini dan kesenjangannya
1.	Tata Kelola OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang diunggah pada portal open data minimal memiliki normalisasi 1NF<sup>1</sup>, namun belum terlaksana pada semua organisasi yang terlibat.</li> <li>- Target jumlah data yang diunggah mencapai 4000 dataset, namun realisasinya hanya 300 dataset karena minimnya pelaksanaan proses pembuatan dataset</li> <li>- Minimnya kegiatan pembuatan dataset yang diikuti oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya open data</li> </ul>
2.	Teknologi OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang diunggah pada portal open data minimal pada format csv. Teknologi pembuatan data csv telah tersedia namun belum mampu dilakukan oleh seluruh Dinas.</li> <li>- Targetnya terdapat API<sup>2</sup> pada 80% dataset, tetapi belum tersedia pelatihan pembuatan teknologi API untuk dataset</li> <li>- Targetnya seluruh Dinas mampu melakukan komputerisasi data, terutama untuk data yang akan dibuka, tetapi teknologi komputerisasi yang telah tersedia belum mampu dimaksimalkan untuk beberapa data</li> </ul>
3.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Targetnya Pedasi<sup>3</sup> di semua dinas telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan data di masing-masing SKPD (<i>softskill</i>), tetapi keaktifan Pedasi masih belum terjadi di seluruh SKPD. Di samping itu belum terdapat <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk penilaian kinerja dan belum ada rancangan penilaian dan monitoring kinerja</li> <li>- Targetnya Semua pedasi telah memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan alur kerja pengelolaan data (<i>hardskill</i>), tetapi belum seluruh Pedasi pada setiap SKPD mampu melaksanakan alur kerja pengelolaan data.</li> </ul>
4.	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat pembagian tugas antara Diskominfo dan Bappeda</li> <li>- Belum terdapat kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan kolaborasi</li> </ul>

Sumber: Diolah dari *Roadmap Open Data* Kota Bandung 2016-2018, Dinas Kominfo Kota Bandung, 2015.

<sup>1</sup> 1NF – bentuk normal yang pertama yang mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Normalisasi database – upaya mengembalikan data ke dalam bentuk normal kembali (NF) karena data yang direkam dan dimasukkan secara mentah dalam suatu tabel sangat mungkin terjadi inkonsistensi dan anomali data.

<sup>2</sup> API (*Application Programming Interface*) – kumpulan fungsi-fungsi/perintah-perintah program dan protokol untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam system call dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Perannya adalah sebagai pembawa yang menerima permintaan pengguna dan memberitahu sistem tentang apa yang harus dilakukan, untuk kemudian memberi respon yang sesuai dengan permintaan tersebut.

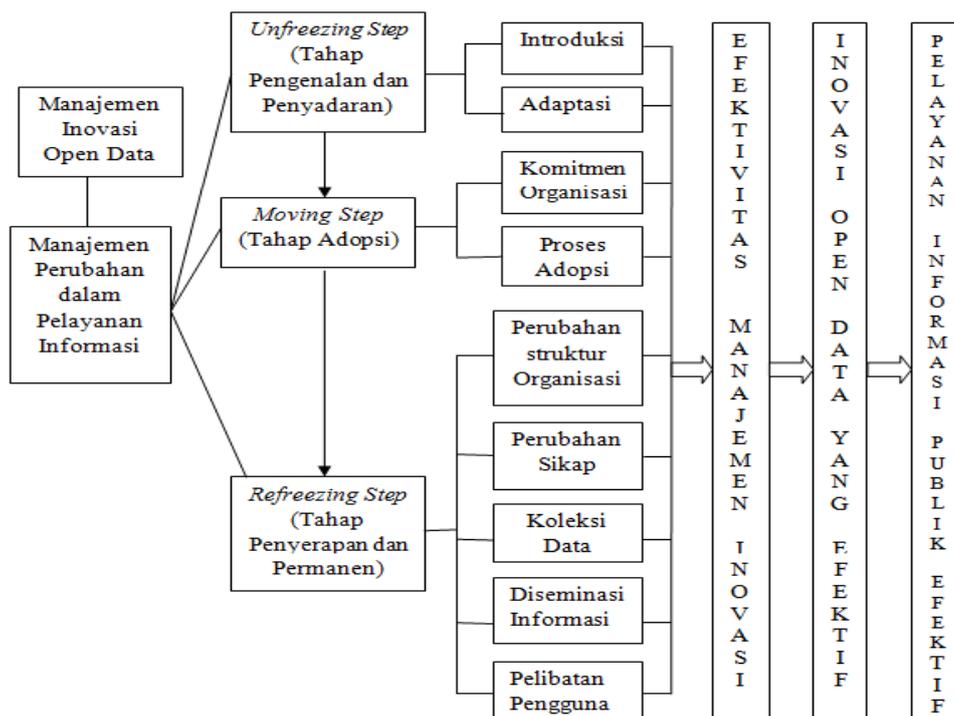
<sup>3</sup> Pedasi – Petugas Data dan Informasi yang ada di setiap SKPD di Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas hasil riset untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan manajemen inovasi Open Data di pemerintah Kota Bandung dipandang belum efektif. Pembahasannya disusun berdasarkan langkah-langkah tiga tahap *unfreezing-moving-refreezing* yang diadaptasi/dimodifikasi oleh Pugh (2007) dalam konteks manajemen perubahan dalam pelayanan informasi. Alasan penggunaan model manajemen perubahan adalah karena inovasi adalah bentuk spesifik dari perubahan, dan inovasi di sektor publik merupakan suatu perubahan yang ditandai dengan adanya proses

introduksi elemen-llemen baru ke dalam pelayanan publik dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, dan/atau manajemen atau keterampilan baru dalam prosesnya, yang mempresentasikan diskontinu dengan masa lalu (Osborne & Brown, 2005; De Vries et al, 2014). Kemudian Kelley (2016) menyatakan bahwa “*managing innovation is about managing change*”.

Adapun tujuan dari riset ini adalah untuk menemukan konsep baru bagi pengembangan manajemen perubahan dan inovasi, khususnya di sektor publik. Kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka proposisi yang diajukan adalah:

“manajemen inovasi Open Data dalam kerangka keterbukaan informasi publik belum efektif karena tidak diterapkannya manajemen perubahan *three steps* pada pelayanan informasi, yaitu *unfreezing*, *moving*, dan *refreezing*.”

## MERODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus, dengan pertimbangan bahwa metode dan strategi ini relevan digunakan untuk mendapatkan gambaran holistik, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta apa yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan *Open Data* (OD) di Kota Bandung. Gambaran tersebut dapat diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, serta observasi untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi perilaku objek yang sedang diteliti.

Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung, dan observasi tampilan *Open Data*, yang dipublikasikan di situs Satu Data Kota Bandung, yaitu [data.bandung.go.id](http://data.bandung.go.id), dan [ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id). Wawancara bertujuan untuk menggali keterangan dari informan berkaitan dengan data yang tidak atau kurang terungkap dalam dokumen maupun observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi tentang inovasi di sektor publik tersebut bersama-sama dengan Manajemen Publik menjadi landasan untuk menyusun definisi atas fokus riset ini. Maka manajemen perubahan inovasi *Open Data* di Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai proses menggerakkan, mengoptimalkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan SDM dan non SDM sesuai dengan tuntutan kebijakan *Open Data* sebagai elemen baru dalam organisasi, melalui pengelolaan tahap-tahap perubahan yang rasional, dengan tujuan meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

Mengacu pada hal tersebut maka teori atau model manajemen perubahan menjadi pemandu dan alat analisis dalam riset ini. *Three Step Model* (Teori *Force*) manajemen perubahan dari Lewin (1951) yang dikembangkan oleh Pugh (2007) dalam konteks Manajemen Perubahan dalam Pelayanan Informasi yang telah memandu riset ini dalam mengumpulkan data, analisis data, sampai dengan sistematika penyajian laporan riset. Tentunya pemikiran-pemikiran dari pakar lain yang relevan, terutama berkaitan dengan manajemen perubahan, inovasi, dan pelayanan publik, berkontribusi pula dalam pembahasan analitis atas temuan-temuan riset.

## 1) Tahap Penyadaran dan Pengenalan (*Unfreezing*)

Tahap ini terdiri atas proses introduksi dan adaptasi Inovasi Open Data. Ada tiga lapis introduksi yang terjadi, yaitu:

- a. persuasi dan difusi inovasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemda Kota Bandung (*top-down Innovation*)
- b. persuasi dan difusi inovasi dari komunitas *Open Data* kepada Pemkot Bandung (*bottom-up innovation*)
- c. Setelah menandatangani deklarasi sebagai komitmen melaksanakan Open Data pada bulan Desember 2014, Pemkot Bandung dengan dibantu mitra konsultan dan *funding* membuat proyek-proyek berkaitan dengan diseminasi/sosialisasi secara internal dan eksternal organisasi, yaitu: melalui pelatihan, seminar, FGD, dan kompetisi Open Data.

Sementara adaptasi meliputi persiapan organisasi secara struktural dan manajerial. Di tahap ini program Open Data berpindah-pindah kedudukan dalam struktur organisasi. Menimbang di tahun pertama, yaitu tahun 2015 program ini belum teranggarkan maka program OD dititip di Bappeda, dan di tahun yang sama

dipindahkan penitipannya ke Dinas Kominfo bidang TIK. Untuk kedua kalinya, masih di tahun yang sama program ini berpindah ke Bidang Diseminasi Informasi Dinas Kominfo, yang memiliki anggaran untuk sosialisasi KIP dan kegiatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat)

## 2) Tahap Perubahan (*Moving/Changing*)

Tahap ini merupakan tahap implementasi perubahan atau adopsi inovasi yang meliputi dua konten, yaitu: Komitmen organisasi terhadap perubahan inovatif, dan proses implementasi/adopsi inovasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan, seperti: penyediaan anggaran, penetapan kebijakan tentang standar prosedur operasional, penyediaan sarana dan prasarana (aplikasi program, teknologi informasi), penyediaan dan penunjukan SDM yang memadai (secara kuantitas dan kualitas)

Adapun alur/tahap-tahap membuka data terdiri atas tiga tahap yang dilakukan oleh tiga seksi di bidang Data dan Statistika: survey dan akuisisi data, pengolahan dan analisis data, publikasi dan data terbuka. Di tahap ini terjadi kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan Bidang Diseminasi Informasi dalam hal pengecekan untuk memastikan suatu data merupakan informasi publik yang terbuka

atau dikecualikan/rahasia. Kesulitan lainnya adalah kesulitan yang dialami Tim Open Data untuk meminta data dari Pedasi di SKPD-SKPD, karena para Pedasi pun mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data internal yang tersebar di berbagai divisi. Di samping itu para Pedasi memiliki tugas ganda, sehingga tugas Pedasi dipandang sebagai beban kerja tambahan yang tidak diapresiasi karena tidak ada insentif untuk itu.

### 3) Tahap penyerapan dan permanennya inovasi (*Refreezing*)

#### a. Perubahan struktur organisasi

Di tahun 2017, setelah dua tahun penerapan Open Data (OD), terjadi perubahan struktur organisasi yang menjadikan pengelolaan OD di satu bidang tersendiri yaitu Bidang Data dan Statistika di Dinas Kominfo. Perubahan ini dilakukan agar penyelesaian tugas bisa lebih fokus. Sebelumnya OD dikelola oleh SKPD dan dua bidang yang berbeda, yaitu: di Bappeda di awal peluncurannya sebelum dipindah ke Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Kominfo, kemudian dikelola oleh Bidang Diseminasi Informasi Dinas Kominfo di tahun 2015-2016.

#### b. perubahan sikap (*sharing, learning, collaborating*)

Perubahan sikap tampak setelah dilakukannya sosialisasi, pelatihan dan workshop bagi Pedasi. Sikap mendukung inovasi diperlihatkan staf manakala tugas tersebut dapat dipahami dan memudahkan tugas mereka. Wujud dari dukungan tersebut adalah melalui kelancaran dalam *sharing* data, kerja sama, dan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyerahan data kepada Tim OD.

Sebaliknya sikap menolak atau enggan menerima (*resistant*) diperlihatkan staf manakala beban tugas mereka melebihi kesanggupan dan kurang diperhatikannya kesejahteraan mereka. Wujud dari resistensi tersebut dapat melalui ketidaklancaran dalam *sharing* data, kerja sama, dan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyerahan data kepada Tim OD.

#### c. Kumpulan data

Berdasarkan statistik di portal [data.bandung.go.id](http://data.bandung.go.id) per Mei 2018 Pemkot Bandung menguasai OD sebanyak 1. 281.000 dataset. Sumber datanya berasal dari 71 SKPD, terdiri terdiri dari 8 group, dan 11 data yang divisualisasikan. Menurut komunitas OD, kumpulan data terbuka dipandang cukup

memadai, meskipun data yang tersedia tidak semuanya sesuai standar. Kemudian dipandang cukup *user friendly* untuk orang-orang yang memahami atau sering berkecimpung dengan data, meskipun agak sulit jika orang awam yang ingin mengaksesnya.

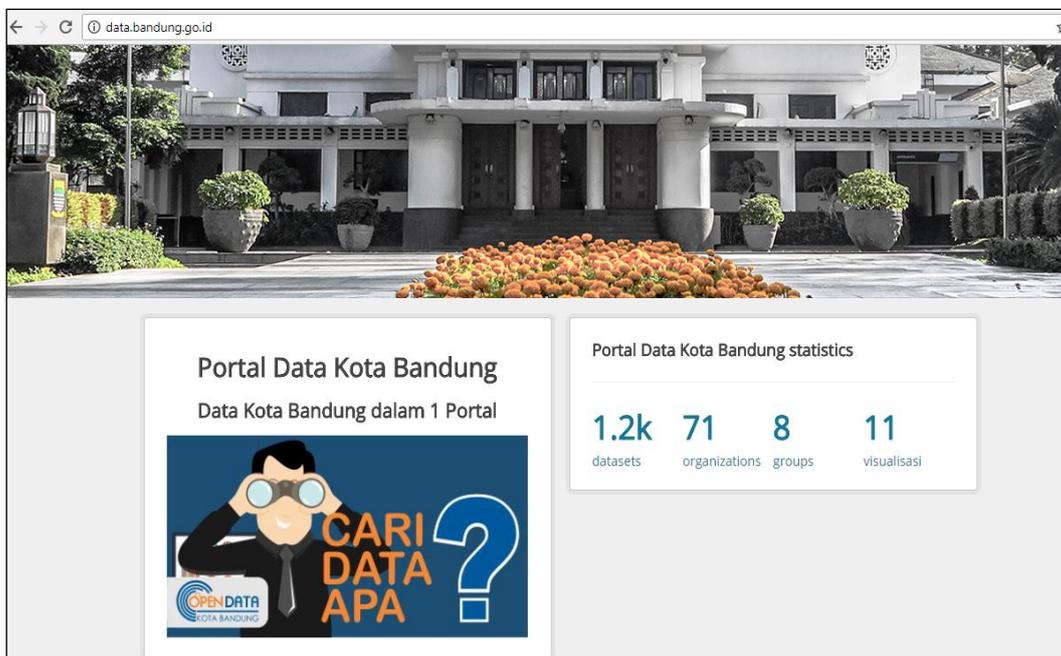
Melalui program Satu Data dan Open Data dengan aplikasinya tersebut telah membantu pemda dalam memperoleh data tunggal yang akurat. Misalnya saja data tentang jumlah dan klasifikasi kemiskinan yang awalnya bisa

berbeda antara Dinas Sosial dengan BPS, tetapi dengan adanya portal Satu Data kini data kemiskinan hanya ada satu dan dapat diandalkan.

Melalui *Open Data*, publik juga dapat mengakses berbagai informasi yang andal dengan berbagai isu. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mengakses data terbuka:

- 1) Langkah pertama, tik [data.bandung.go.id](http://data.bandung.go.id), maka akan muncul portal OD Kota Bandung dengan tampilan seperti gambar berikut ini:

**Gambar 2 Tampilan Portal Open Data Kota Bandung**



Sumber: Situs data.bandung.go.id tahun 2018

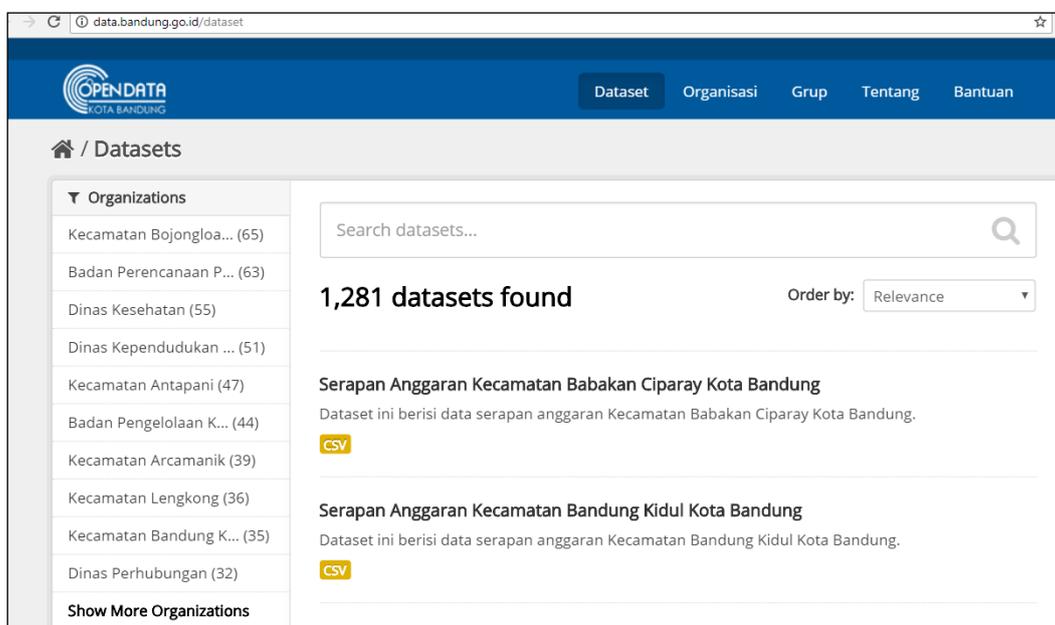
Angka-angka 22 statistik yang menunjukkan bahwa Kota Bandung dicantumkan di gambar tersebut memiliki Data dalam format terbuka

sebanyak 1.200-an dataset, sumbernya berasal dari 71 SKPD, yang terdiri dari 8 group, dan 11 data yang divisualisasikan. Publikasi ini memenuhi prinsip pertama OD, yaitu terbuka secara *default* (*Open by default*), artinya pemerintah secara aktif mengumumkan data tanpa mekanisme permintaan/permohonan oleh publik pengguna dengan ketentuan ketersediaan dan akses melalui internet.

Setelah masuk ke portal tersebut kita dapat berselancar untuk mencari data yang diinginkan dengan melanjutkan ke langkah berikutnya.

2) Langkah kedua, klik menu *search* atau mengklik salah satu angka statistik tersebut. Misalnya meng-klik angka 1.2k, maka yang muncul adalah tampilan berikut:

**Gambar 3 Tampilan Datasets pada Portal OD Kota Bandung**



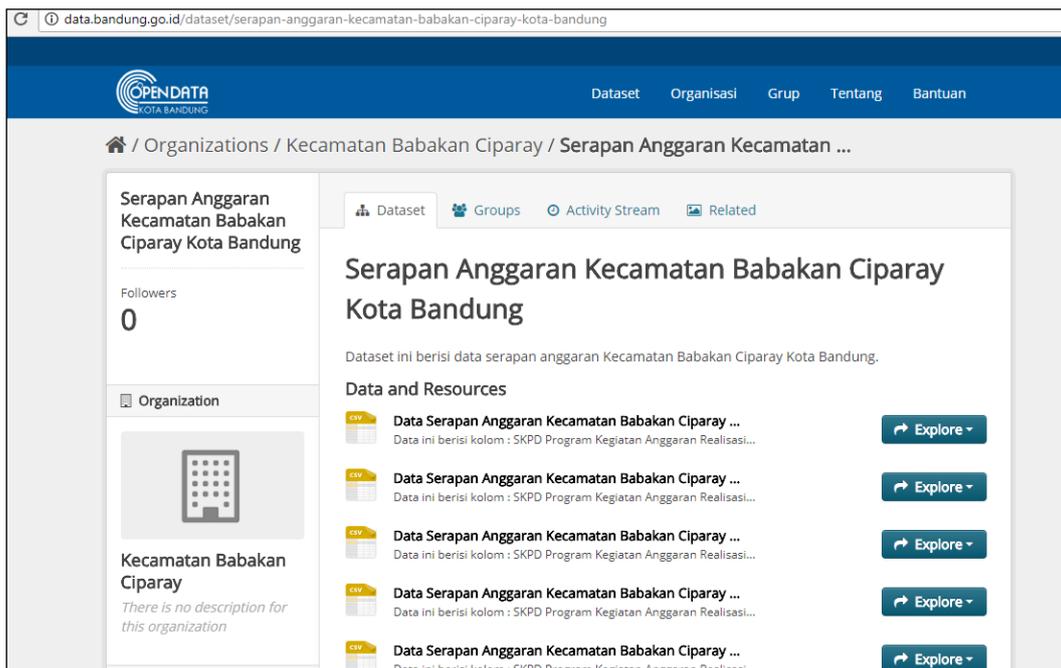
Sumber: Portal OD Kota Bandung, 2018

Gambar tersebut menjelaskan lebih rinci lagi bahwa *dataset* yang dikuasai oleh Pemkot Bandung adalah 1.281 dataset. Pemenuhan koleksi dataset hanya mencapai sepertiganya dari target sejumlah 4000 dataset (berdasarkan *Roadmap* 2016-2018) per Mei 2018. Artinya masih jauh dari harapan, sementara waktu yang tersisa

adalah sekitar enam bulan sampai akhir tahun 2018.

3) Langkah ketiga, klik menu “Serapan Anggaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung”, maka yang muncul adalah tampilan berikut:

**Gambar 4 Tampilan files pada Portal OD Kota Bandung**



Sumber: Portal OD Kota Bandung, Mei 2018

Gambar tersebut menampilkan dataset dengan subjek tertentu secara *time series* yang memungkinkan pengguna dapat menganalisis *trend* dari subjek data tersebut dan menjadikannya informasi yang bernilai, atau lebih jauh lagi dapat menghasilkan inovasi atas pengolahan

dataset tersebut jika *interoperable* yaitu, dapat bercampur dengan data set lainnya untuk menghasilkan data atau *tool* baru.

4) Langkah terakhir adalah: klik “*explore*”, maka yang muncul adalah tampilan berikut:

**Gambar 5 Tampilan Tabulasi Data dengan FormatTerbuka pada Portal OD Kota Bandung**

	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Tahun	Catatan
1	SKPD						
2	Kecamatan Bab	Program Pening Peningkatan	1.3E+09	1.04E+09	80.03	2013	-
3	Kecamatan Bab	Program Pening Fasilitas Peningkat	6.82E+08	6.31E+08	92.52	2013	-
4	Kecamatan Bab	Program Pening Fasilitas Peningkat	3.56E+08	3.21E+08	90.12	2013	-
5	Kecamatan Bab	Program Pening Fasilitas Peningkat	1.03E+08	71439500	69.27	2013	-
6	Kecamatan Bab	Program Pening Fasilitas Peningkat	99330000	76934000	77.45	2013	-
7	Kecamatan Bab	Program Pening Peningkatan Kualit	66000000	56330000	85.35	2013	-
8	Kecamatan Bab	Program Pening Pembuatan Pojok	11000000	11000000	100	2013	-
9							
10							
11							
12							
13							

Sumber: Portal OD Kota Bandung, Mei 2018

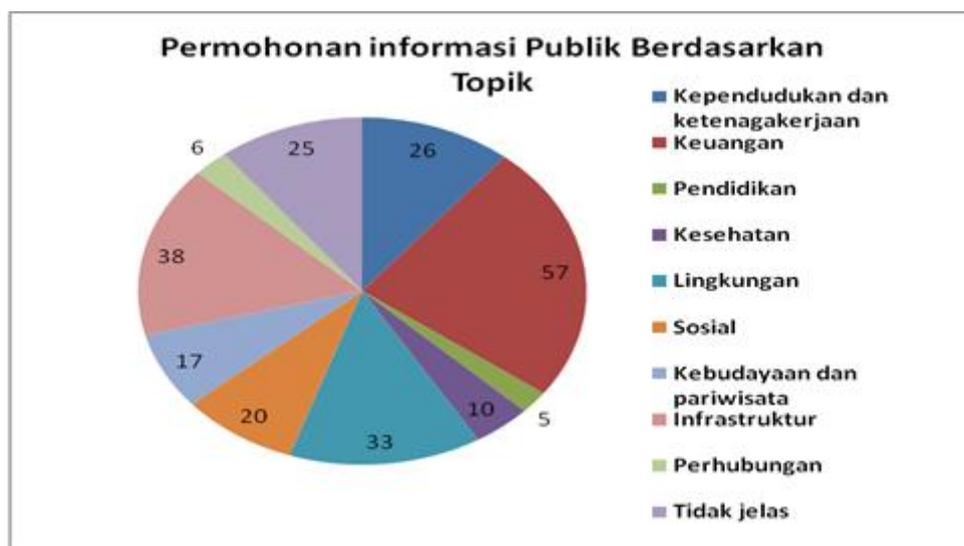
Tampilan gambar di atas merupakan data dengan format terbuka yaitu CSV yang memungkinkan komputer secara otomatis membacanya dan dapat diolah kembali dengan memadukan (interoperabilitas) data tersebut dengan data lain sehingga diharapkan/berpotensi menghasilkan berbagai inovasi yang aplikatif.

Kondisi ini berarti belum terpenuhinya prinsip OD ketiga, yaitu *accessible and usable* karena hanya bisa diakses tetapi tidak dapat digunakan. Maka upaya untuk menerbitkan data tersebut menjadi sia-sia karena tidak bernilai. Kasus serupa pernah ditemukan oleh Krishnamurthy & Awazu (2016) dalam risetnya tentang OD di Amerika Serikat pada masa administrasi Obama, yang dapat

diamati dari situs *Data.gov*. Dari studinya ditemukan fakta bahwa meskipun terdapat konsolidasi data dari berbagai sumber yang dapat mendukung inovasi yang melampaui sektor publik, tetapi akses datanya sendiri tidak dapat memacu inovasi.

Dalam hal kuantitas pihak Pemkot Bandung pun mengakui hal tersebut. Menurut keterangan koordinator tim OD, ada beberapa pemohon informasi yang mengeluhkan data yang tidak disediakan di portal tersebut. Oleh karena itu menurutnya sangat penting koordinasi dengan jajaran PPID mengenai jenis informasi yang harus disediakan dan identifikasi jenis informasi yang banyak diminta oleh publik. Berikut adalah jenis pemohon dan informasi yang dimohonkan publik.

**Gambar 6 Permohonan informasi Publik Berdasarkan Topik**



Sumber: Diolah dari Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kota Bandung tahun 2016.

Melalui data jenis informasi publik yang dibutuhkan masyarakat pengguna informasi publik seperti gambar di atas, maka diharapkan Bidang Data dan

Statistika, sebagai bidang pengelola OD, mendapatkan pencerahan mengenai informasi yang dipertimbangkan untuk diolah menjadi data terbuka.

**Tabel 2 Rekapitulasi permohonan Informasi Publik**

No.	Tahun	Jumlah permohonan informasi	Jenis pemohon informasi
1.	2016	235	PNS, Pensiunan PNS, dosen, mahasiswa, guru, pelajar, karyawan swasta, wartawan, wiraswasta, tuna karya, direktur, advokat, marketer. LSM, Perhimpunan Pemilik Penghuni, Satuan Rumah Susun (P3SRS)
2.	2017	159	Dosen, guru, mahasiswa, ASN, pegawai swasta, marketer, wiraswasta, IRT, direktur

Sumber: diolah dari Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) tahun 2016 dan 2017.

Tabel di atas menunjukkan keragaman pemohon dan pengguna informasi publik yang juga menunjukkan bahwa publik semakin “*aware*” akan kehadiran kebijakan tentang KIP ini. Pengguna informasi publik ini berpotensi menjadi pengguna Open Data. Oleh karenanya dimungkinkan untuk menjadikan data tersebut sebagai acuan dalam menentukan sasaran diseminasi Open Data kepada publik.

#### **d. Diseminasi informasi**

Diseminasi informasi tentang Open Data dilakukan oleh Seksi Publikasi Data, Bidang Data dan Statistika Diskominfo Kota Bandung ke kampus-kampus

Perguruan Tinggi dan SKPD. Bentuk kegiatannya adalah *roadshow* atau terjun ke lapangan, dan melalui infografis sebagai iklan melalui media sosial. Sedangkan diseminasi informasi tentang KIP dilakukan oleh Seksi Penguatan KIP. Bidang Diseminasi Informasi dalam bentuk *roadshow* dan pengumuman informasi publik berkala dan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui website PPID Kota Bandung.

Tujuan dari kegiatan diseminasi ke kampus-kampus ini adalah untuk memperkenalkan Open Data dan pemanfaatannya bagi publik, dan untuk menjaring pendapat tentang data yang dibutuhkan oleh publik. Sementara tujuan

diseminasi ke SKPD adalah sebagai bentuk persuasi dan bimbingan dalam *data Discovery* dan pembersihan data sesuai dengan ketentuan OD.

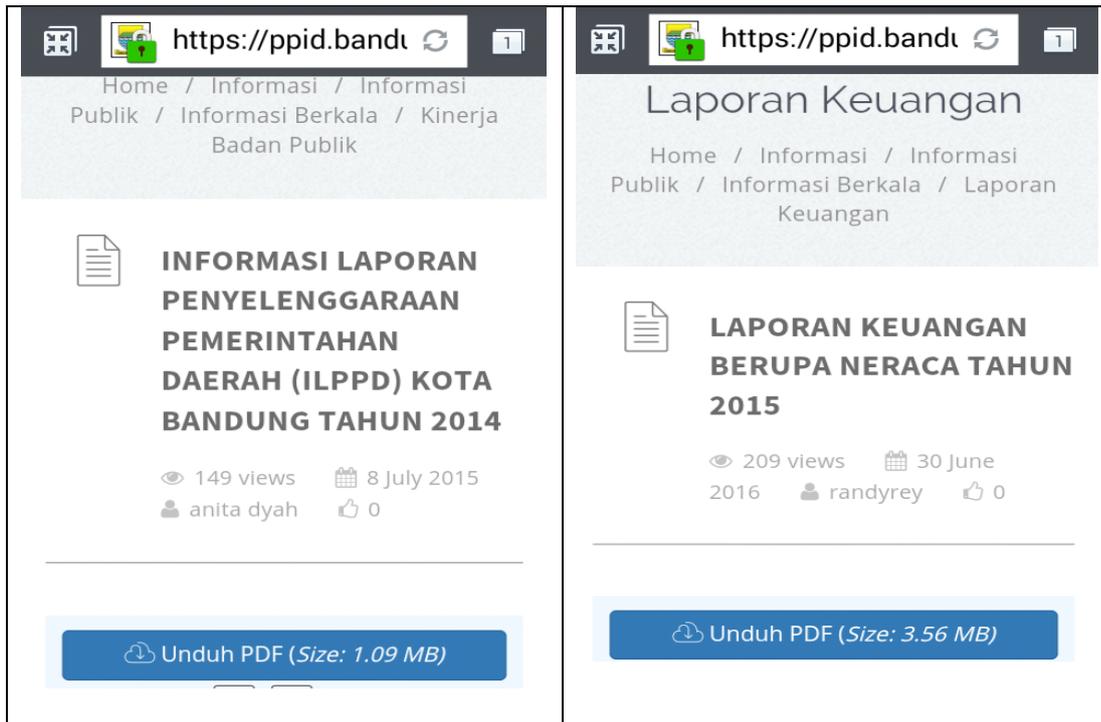
Proses akhir dari kerja tim OD adalah mempublikasikan data terbuka. Ada dua output atau cara penyajian data yaitu dalam bentuk tabulasi dan infografis. Tabulasi dengan format csv merupakan “OD sejati” karena merupakan OD yang sebenarnya, memenuhi prinsip-prinsip OD sehingga dapat dibaca dan diolah secara otomatis oleh komputer yang memungkinkan digunakan dan digunakan secara bebas dan didistribusikan kembali. Sementara infografis ditampilkan untuk memenuhi dua fungsi, yaitu: pertama, sebagai iklan atau pemberitahuan tentang data yang dikuasai dan terbuka; kedua, sebagai bentuk pelayanan data bagi masyarakat “awam OD”. Infografis ini ditayangkan di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Rogers (1983) menyatakan bahwa inovasi menuntut pengguna (*users*) dan penyedia layanan (*service provider*) untuk mempelajari “*new tricks*”. Secara tidak sadar inovasi menciptakan ketidaksetaraan (*inegalitarian aspect*). Sehingga cenderung

menyulitkan bagi masyarakat awam yang gagap teknologi.

Tampaknya masalah tersebut menjadi alasan bagi pemerintah kota Bandung untuk menyajikan OD dalam format “info grafis” yang mudah dipahami oleh awam, meskipun kemudian OD menurut penjelasan Kasie. Penguatan Informasi Publik menjadi “kehilangan ruhnya”. Mengapa demikian? Karena sejatinya OD adalah konsep penyajian data dengan format yang memudahkan pengguna untuk dapat mengolah kembali data tersebut secara otomatis melalui program Komputer sehingga dapat menghasilkan aplikasi baru. Sementara infografis tidak secara otomatis dapat dibaca dan diolah oleh program komputer.

Selain alamat situs yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi perbedaan publikasi untuk OD dan bukan OD. Informasi publik secara umum, tanpa Open Data dipublikasikan di portal [ppid.bandung.go.id](http://ppid.bandung.go.id). Sementara informasi publik dengan format OD dipublikasikan di portal [data.bandung.go.id](http://data.bandung.go.id). Tampilan publikasi Informasi Publik dalam format “Data terbuka dan tidak terbuka” dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini.

**Gambar 7 Tampilan “Data Tidak Terbuka”**

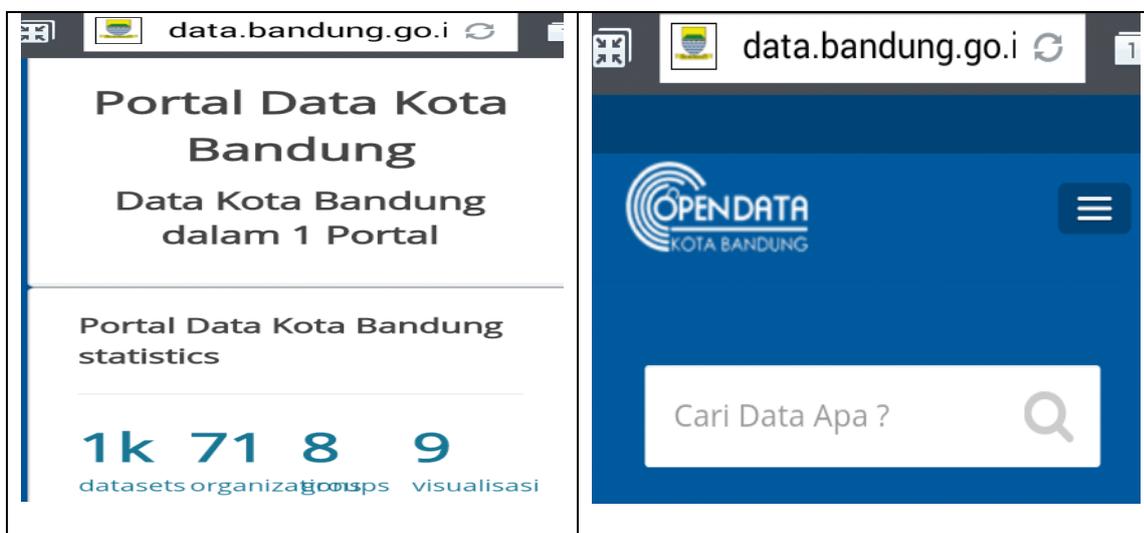


Sumber: Situs resmi PPID Kota Bandung (2017)

Gambar di atas merupakan tampilan data tidak terbuka karena format datanya masih dalam bentuk PDF, sehingga tidak fleksibel untuk dibaca dan diolah secara otomatis oleh komputer. Meskipun demikian informasi yang

ditampilkan memenuhi standar informasi publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu menampilkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui situs internet resmi badan publik.

**Gambar 8 Tampilan portal Open Data Kota Bandung**

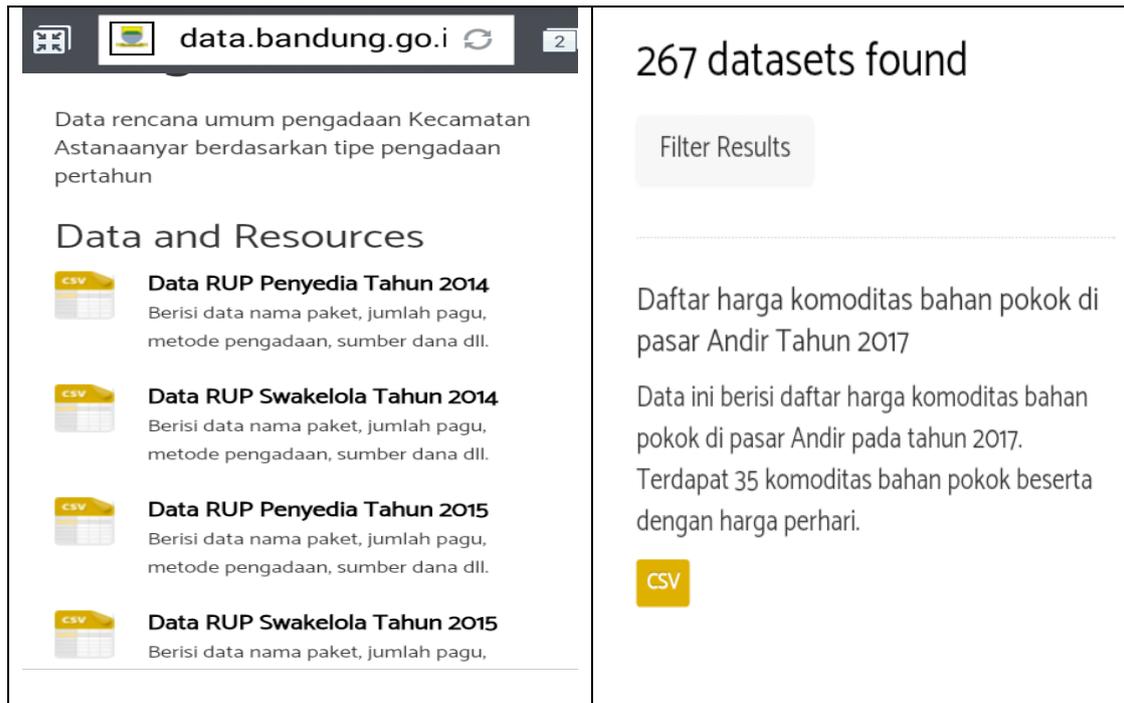


Sumber: Situs resmi Open Data Kota Bandung tahun 2017

Gambar di atas merupakan tampilan portal data tentang Kota Bandung dalam Satu Data. Seperti umumnya portal yang memuat konten OD, situs ini menampilkan

jumlah set data dan kolom pencarian data di halaman utamanya. Dari portal ini pengguna dapat berselancar untuk mencari data yang dibutuhkan.

**Gambar 9 Tampilan “Data Terbuka”**



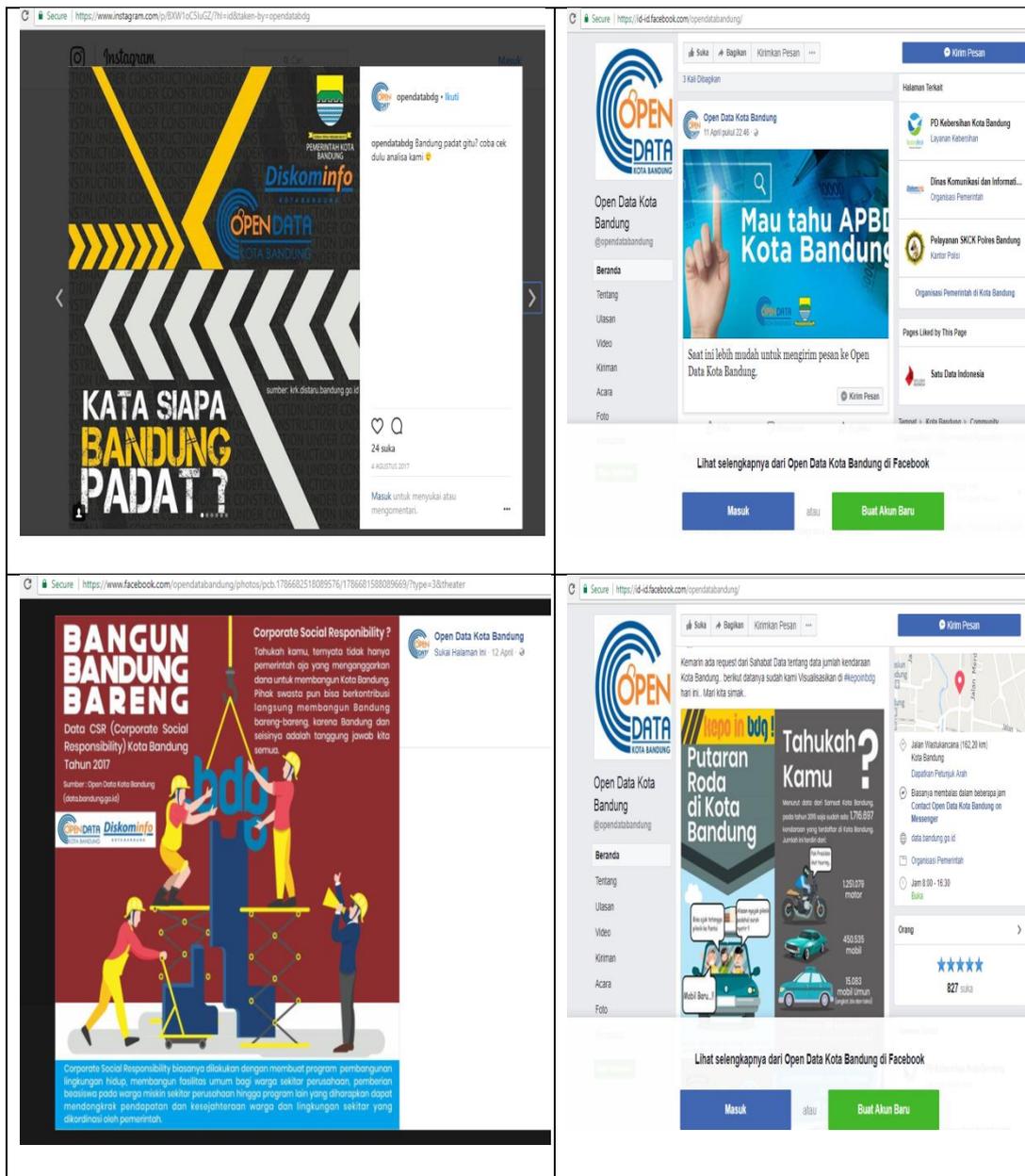
Sumber: Situs resmi PPID Kota Bandung tahun 2017

Gambar di atas merupakan tampilan informasi dalam bentuk data terbuka karena menggunakan format *csv* yang dapat dibaca dan diolah secara otomatis oleh komputer. Dengan demikian diharapkan publik atau pengguna dapat

mengolahnya menjadi data baru atau inovasi berupa *system/tool* baru.

Berikut adalah contoh diseminasi informasi tentang OD melalui media sosial.

## Gambar 10 Diseminasi Open Data melalui Media Sosial



Sumber: Media Sosial Open Data Pemkot Bandung (Instagram dan facebook)

Gambar-gambar tersebut dikelola oleh Tim OD Bagian Infografis sebagai bentuk iklan atau pengumuman tentang OD yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat melalui media sosial yang banyak diakses publik. Penyajian infografis dibuat semenarik mungkin agar

publik mau mengunjungi situs data terbuka.

### e. Pelibatan pengguna Open Data

Selama ada program OD di sektor publik, pelibatan atau kolaborasi dengan berbagai komunitas OD dan masyarakat pengguna OD masih terus dibutuhkan dan akan berlanjut, karena melalui data terbuka

yang melimpah publik dapat memantau langsung, mengelola, mempelajari dan mengembangkan data. Berbagai kegiatan dan fasilitas dikembangkan untuk mendukung partisipasi publik dan upaya *Sustaining* Inovasi Open Data. Publik distimulus untuk dapat berinovasi dengan Data Terbuka yang dimiliki pemerintah. Misalnya Pemkot Bandung memfasilitasi penyediaan gedung bagi *Coworking Space* yang difungsikan sebagai tempat kerja di luar kantor yang konvensional, dengan fasilitas yang dibuat senyaman mungkin untuk bekerja, berkumpul, menghasilkan karya dan kebaikan bagi warga Kota Bandung, dan pemecahan masalah-masalah kota. Pemkot Bandung juga mendukung kegiatan-kegiatan kompetisi OD.

## SIMPULAN

Belum efektifnya pelaksanaan inovasi *Open Data* di pemerintah Kota Bandung adalah karena manajemen perubahan yang belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan tiga tahapan perubahan yaitu *unfreezing-moving-unfreezing steps* dalam pelayanan informasi (Pugh, 2007). Di samping itu pelaksanaan *Open Data* (OD) belum secara optimal terintegrasi dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal tersebut mengacu pada beberapa temuan dalam riset ini, yaitu:

### 1. Tahap *Unfreezing*

Pada tahap introduksi dan adaptasi (mempersiapkan organisasi yang sehat) lebih menekankan pada sosialisasi kepada publik (melalui lomba-lomba, diskusi dan seminar), alih-alih pengembangan kapasitas SDM internal organisasi. Hal ini berimplikasi pada ketidaksiapan SDM internal untuk menerima perubahan yang dibawa oleh program OD. Misalnya: ada perbedaan persepsi tentang tugas yang diemban oleh Petugas Data dan Informasi (Pedasi), dan sulitnya mengumpulkan data yang akan diolah menjadi data terbuka.

### 2. Tahap *moving*

Komitmen organisasi tidak didukung anggaran yang memadai bagi operasional OD, kegiatan diseminasi dan pengembangan-pelatihan SDM di internal organisasi.. Hal ini berimplikasi pada proses adopsi (tahap-tahap pelaksanaan OD) yang tidak lancar, dan kuantitas dan kualitas data yang tidak memenuhi target.

### 3. Tahap *refreezing*

Di tahap ini meskipun telah terjadi perubahan struktur organisasi *Open Data* (OD), tetapi belum terintegrasi dalam lingkup struktur pelayanan informasi publik. Hal ini berimplikasi

pada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tidak tegas dan tidak lancar antar-bidang dan antar-SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan OD. Ketidaktegasan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat atas pemilihan dan tampilan data (diseminasi informasi) yang dipublikasikan.

Berdasarkan hasil analisis pada hasil, pembahasan dan simpulan, maka beberapa konsep baru yang dapat ditambahkan dan sebagai pelengkap dalam konsep manajemen perubahan pada pelayanan informasi dari Lewin dan Pugh adalah:

1. Tahap *sustaining* (bertahan), karena inovasi yang berhasil di sektor publik adalah yang memberikan manfaat bagi organisasi dan publik sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya sebagai proses yang terus menerus disempurnakan.
2. Arena interaktif yang dibangun oleh manajer dalam fungsinya sebagai konvener (pengelola perkumpulan), mediator (memfasilitasi kolaborasi antar-pemangku kepentingan), dan

katalisator (pemacu komunikasi dan koordinasi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Kelley, Braden. 2016. *Charting Change*. Hampshire: Palgrave MacMillan
- Lewin, Kurt. 1951. *Field Theory in Social Sciences: Selected Theoretical Papers*. London: Tavistock
- Monino, Jean-Louis & Soraya Sedkaoui. 2016. *Big Data, Open Data, and Data Development*. London: ISTE Ltd
- Osborne, Stephen P & Brown, Kerry. 2005. *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. London: Routledge.
- Open Government Indonesia (OGI). 2015. Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia 2014. Jakarta: OGI
- Open Knowledge Foundation (OKFN). 2010. *Open Data Handbook*.
- Roadmap Open Data Kota Bandung 2016-2018. 2015. Dinas Kominfo Kota Bandung.
- Pugh, Lyndon. 2007. *Change Management in Information Services*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- PPID Kota Bandung. 2016. "Meknisme Pelayanan Informasi Publik". Melalui <<https://ppid.bandung.go.id/mekani-sme-pelayanan-informasi-publik/https://data.go.id/konten/per-kenalan-inisiatif-satu-data/#dasar-hukum>> [2/24/18]